**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

# I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

## 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

## 1.3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program
- 2.3 Posisi Keuangan
- 2.4 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  - a. Pendapatan Daerah
  - b. Belanja Daerah
  - c. Transfer
  - d. Pembiayaan
- 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
  - a. Aset
  - b. Kewajiban
  - c. Ekuitas
- 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
  - a. Pendapatan Laporan Operasional
  - b. Beban
  - c. Kegiatan Non Operasional
  - d. Pos-pos Luar Biasa
  - e. Surplus (Defisit) LO
- 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP

# II. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

## 2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut.

### a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pada APBD Tahun 2021, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp. 604.785.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 573.090.400,00, terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2021

*dalam rupiah*

| Jenis Pendapatan | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | % | Pelampauan Target | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2 | 6=3-2 | 7=6/2 |
| Retribusi Pmekaian Kekayaan Daearah | 680.400 | 680.400 | 680.400 | 100 | - | - |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | 250.235.000 | 265.760.000 | 247.072.000 | 106,20 | 15.525.000 | 6,20 |
| Penjualan Hasil Pertanian | - | - | 103.200.000 | - | - | |
| Penjualan Hasil Perkebunan | - | - | - | - | - | |
| Pendapatan sewa Tanah | - | - | 186.350.000 | - | - | |
| Penerimaan dari hasil pameran | - | - | - | - | - | |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 150.270.000 | 72.000.000 | - | 47,91 | (78.270.000) | (52,09) |
| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 203.600.000 | 234.650.000 | - | 115,25 | 31.050.000 | 15,25 |
| **Total Pendapatan Asli Daerah** | **604.785.400** | **573.090.400** | **537.835.400** | **94,76** | **(31.695.000)** | **(7,81)** |

Kinerja pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2017 s/d 2021

| Jenis Pendapatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil Retribusi Daerah | 229.204.000 | 268.881.560 | 255.855.400 | 247.752.400 | 266.440.400 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 280.786.000 | 273.070.000 | 281.980.000 | 289.550.000 | 306.650.000 |
| **Total Pendapatan Asli Daerah** | **509.990.000** | **541.951.560** | **537.835.400** | **537.302.400** | **573.090.400** |

Selama ini hasil pencapaian PAD Dinas Pertanian selalu mengalami fluktuasi. Tetapi sejak tahun 2017 hingga 2018 terus mengalami kenaikan yg cukup signifikan. Di tahun 2019 mengalami penurunan diantaranya karena adanya pengalihan asset Kebun Dinas Purwosono pada dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang serta adanya keterlambatan penjualan bibit kentang pada Kebun Dinas Argosari. Dan pada tahun 2020 pencapaian PAD Dinas Pertanian juga mengalami penurunan sebesar 0.10 % dari tahun 2019 di karena adanya Pandemi Covid 19 yang diantaranya berimbas pada pencapaian beberapa rekening PAD Dinas Pertanian. Dan pada tahun 2021 pencapaian PAD Dinas Pertanian mengalami kenaikan karena nilai pada potensi aset tanah kebun Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang dilelang sewakan mengalami kenaikan 2% dibanding tahun yang lalu.

**b. BELANJA DAERAH**

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah. Sedangkan belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap lainnya.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021**

| No | Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Operasi | 32.255.547.556 | 30.405.305.823 | 94,26 | 1.850.241.733 |
| 2 | Belanja Modal | 912.416.123 | 793.685.800 | 86,99 | 118.730.323 |
| | Jumlah Belanja | **33.167.963.679** | **31.198.991.623** | 94,06 | **1.968.972.056** |

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2021**

| Belanja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 2.873.652.972 | 11.513.161.073 | 13.202.683.475 | 12.930.658.422 | 12.097.485.680 |
| Belanja Barang Jasa | 15.065.644.651 | 15.819.483.921 | 16.789.924.907 | 12.156.193.287 | 13.394.634.725 |
| Belanja Hibah | - | - | - | - | 4.913.185.418 |
| **Jumlah** | 17.939.297.623 | 27.332.644.994 | 29.992.608.382 | 25.086.851.709 | 30.405.305.823 |
| % Kenaikan | - 37,72 % | 52,36 % | 9,73 % | -16,36% | 21,20% |

## 2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program** | **: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | |
| **Kegiatan** | **: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 4.232.000,00 | 4.182.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **4.232.000,00** | **4.182.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **2.050.000,00** | **2.050.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **600.000,00** | **600.000,00** | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kegiatan** | **: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **1.623.000,00** | **1.623.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Pegawai | 12.127.010.161,00 | 12.058.489.860,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **12.127.010.161,00** | **12.058.489.860,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Pegawai | 43.895.820,00 | 38.995.820,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **43.895.820,00** | **38.995.820,00** | |
| **Kegiatan** | **: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 4.736.000,00 | 4.736.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **4.736.000,00** | **4.736.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 1.734.910,00 | 1.380.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **1.734.910,00** | **1.380.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 2.819.000,00 | 2.574.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **2.819.000,00** | **2.574.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 9.149.250,00 | 7.076.500,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **9.149.250,00** | **7.076.500,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Bahan Logistik Kantor** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 151.581.630,00 | 148.338.180,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **151.581.630,00** | **148.338.180,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 31.952.430,00 | 30.737.830,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **31.952.430,00** | **30.737.830,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Bahan/Material** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 4.700.000,00 | 4.450.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **4.700.000,00** | **4.450.000,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kegiatan** | **: Fasilitasi Kunjungan Tamu** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 2.505.000,00 | 2.500.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **2.505.000,00** | **2.500.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 96.634.763,00 | 96.326.200,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **96.634.763,00** | **96.326.200,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 2.000.000,00 | 1.995.500,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **2.000.000,00** | **1.995.500,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 436.572.700,00 | 345.766.140,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **436.572.700,00** | **345.766.140,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 1.176.804.090,00 | 1.123.028.604,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **1.176.804.090,00** | **1.123.028.604,00** | |
| **Kegiatan** | **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 146.076.625,00 | 143.778.484,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **146.076.625,00** | **143.778.484,00** | |
| **Kegiatan** | **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 21.710.000,00 | 21.235.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | 21.710.000,00 | 21.235.000,00 | |
| **Kegiatan** | **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 52.850.477,00 | 49.219.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **52.850.477,00** | **49.219.000,00** | |
| | | | |
| **Program** | **: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | |
| **Kegiatan** | **: Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 1.627.956.794,00 | 1.577.712.960,00 | |
| - Belanja Hibah | 13.539.856,00 | 13.355.968,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **1.641.496.650,00** | **1.591.068.928,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 185.886.353,00 | 182.913.000,00 | |
| - Belanja Hibah | 451.308.797,00 | 439.624.050,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **637.195.150,00** | **622.537.050,00** | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kegiatan** | **: Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 131.331.300,00 | 117.332.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **131.331.300,00** | **117.332.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 36.500.000,00 | 35.035.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **36.500.000,00** | **35.035.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 109.800.000,00 | 109.730.000,00 | |
| - Belanja Hibah | 2.261.286.000,00 | 2.261.286.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **2.371.086.000,00** | **2.371.016.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **20.400.000,00** | **20.400.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **21.600.000,00** | **21.600.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 842.200.000,00 | 837.100.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **842.200.000,00** | **837.100.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 842.200.000,00 | 837.100.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **842.200.000,00** | **837.100.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 38.658.900,00 | 37.758.900,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **38.658.900,00** | **37.758.900,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **21.600.000,00** | **21.600.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **36.000.000,00** | **36.000.000,00** | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program** | **: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | |
| **Kegiatan** | **: Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 43.500.000,00 | 42.000.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **43.500.000,00** | **42.000.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 41.600.018,00 | 41.489.500,00 | |
| - Belanja Hibah | 1.684.199.982,00 | 1.570.271.900,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **1.725.800.000,00** | **1.611.761.400,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 2.642.240.000,00 | 2.640.000.000,00 | |
| - Belanja Hibah | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **3.002.240.000,00** | **3.000.000.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 381.470.000,00 | 381.420.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **381.470.000,00** | **381.420.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 1.045.890.000,00 | 1.045.470.000,00 | |
| - Belanja Hibah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **1.245.890.000,00** | **1.245.470.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 627.765.500,00 | 627.635.500,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **627.765.500,00** | **627.635.500,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 641.480.000,00 | 635.550.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **641.480.000,00** | **635.550.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 422.080.000,00 | 421.925.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **422.080.000,00** | **421.925.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 230.000.000,00 | 224.278.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **230.000.000,00** | **224.278.000,00** | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | |
| **Kegiatan** | **: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 20.000.000,00 | 19.961.700,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **20.000.000,00** | **19.961.700,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **36.000.000,00** | **36.000.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 262.872.000,00 | 262.842.700,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **262.872.000,00** | **262.842.700,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **42.000.000,00** | **42.000.000,00** | |
| **Kegiatan** | **: Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 354.000.000,00 | 354.000.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **354.000.000,00** | **354.000.000,00** | |
| | | | |
| **Program** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | |
| **Kegiatan** | **: Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 128.845.016,00 | 118.945.000,00 | |
| - Belanja Hibah | 103.704.984,00 | 68.647.500,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **232.550.000,00** | **187.592.500,00** | |
| **Kegiatan** | **: Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **43.200.000,00** | **43.200.000,00** | |
| | | | |
| **Program** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | |
| **Kegiatan** | **Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 72.000.000,00 | 61.200.000,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **72.000.000,00** | **61.200.000,00** | |
| | | | |
| **Program** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | |
| **Kegiatan** | **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 590.136.600,00 | 405.370.168,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **590.136.600,00** | **405.370.168,00** | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kegiatan** | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 515.591.300,00 | 78.656.550,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **515.591.300,00** | **78.656.550,00** | |
| **Kegiatan** | **Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 419.870.000,00 | 218.571.709,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **419.870.000,00** | **218.571.709,00** | |
| **Kegiatan** | **Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota** | | |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| - Belanja Barang & Jasa | 1.225.346.300,00 | 702.890.600,00 | |
| Jumlah Kegiatan | **1.225.346.300,00** | **702.890.600,00** | |
| **Total Belanja Operasi** | **32.255.547.556,00** | **30.405.305.823,00** | |

## 2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang selam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021**

| Posisi Keuangan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aset | 31.555.397.698,01 | 29.898.285.168,31 | 34.867.013.184,48 | 30.896.025.950,16 | 29.862.691.283,10 |
| 2. Kewajiban | 113.977.702 | 413.334.164,33 | 114.648.676,67 | 96.333.333,33 | 523.121.283,33 |
| **3. Ekuitas** | **31.441.419.996,02** | **2.592.686.081,16** | **1.774.224.601,78** | **32.532.191.780,63** | **29.339.569.999,77** |
| **Jumlah Kewajiban & Ekuitas** | **31.555.397.698,01** | **31.738.180.136,11** | **34.867.013.184,48** | **32.628.525.113,96** | **29.862.691.283,10** |

## 2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

### 1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

### 2. Lemahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

### 3. Masalah Sistem Pengendalian Intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga

masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

## III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja,

| | Anggaran TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **1) Pendapatan Asli Daerah** | **604.785.400** | **573.090.400** | **537.302.400** |

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang dipungut oleh SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak DipisahkanPenjaualan Hasil Perkebunan
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak DipisahkanPenerimaan dari hasil pameran

Rincian realisasi PAD tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3.1 : Rincian Realisasi PAD tahun 2021 dan 2020**

| NO. | Jenis Pendapatan | Anggaran 2021 | Realisasi | | | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | % | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=4-6 | 8=7/6 |
| 1 | Retribusi Pmekaian Kekayaan Daearah | 680.400 | 680.400 | 100 | 680.400 | - | - |
| 2 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 250.235.000 | 265.760.000 | 106,20 | 247.072.000 | 18.688.000 | 7,56 |
| 3 | Penjualan Hasil Pertanian | - | - | - | 103.200.000 | (103.200.000) | (100,00) |
| 4 | Penjualan Hasil Perkebunan | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Pendapatan sewa Tanah | - | - | - | 186.350.000 | (186.350.000) | (100,00) |
| 6 | Penerimaan dari hasil pameran | - | - | - | - | - | (100) |
| 7 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 150.270.000 | 72.000.000 | 47,91 | - | 72.000.000 | - |
| 8 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 203.600.000 | 234.650.000 | 115,25 | - | 234.650.000 | - |
| | **Jumlah** | **604.785.400** | **573.090.400** | **94,76** | **537.302.400** | **35.788.000** | **6,66** |

| | Anggaran TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **(a) Retribusi Daerah** | **250.915.400** | **266.440.400** | **247.752.400** |

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 3 (tiga) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu .

Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2021 dan 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| NO | Jenis Pendapatan | Anggaran 2021 | Realisasi | | | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | % | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=4-6 | 8=7/6 |
| 1 | Retribusi pemakaian kekayaan daerah | 680.400,00 | 680.400,00 | 100 | 680.400,00 | - | - |
| 2 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 250.235.000,00 | 265.760.000,00 | 106,20 | 247.072.000,00 | 18.688.000,00 | (7.56) |
| | **Jumlah** | **250.915.400,00** | **266.440.400,00** | **106,19** | **247.752.400,00** | **18.688.000,00** | **(7.56)** |

| | Anggaran TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **(b) Lain-lain PAD yang Sah** | **353.870.000,00** | **306.650.000,00** | **289.550.000,00** |

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2021 terinci dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Pendapatan Lain - Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| NO. | Jenis Pendapatan | Anggaran 2021 | Realisasi | | | Kenaikan (Penurunan) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | % | 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=4-6 | 8=7/6 |
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 150.270.000 | 72.000.000 | 47,91 | 103.200.000 | (31.200.000) | (30,23) |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 203.600.000 | 234.650.000 | 115,25 | 186.350.000 | 48.300.000 | 25,92 |
| | **Jumlah** | **353.870.000,00** | **306.650.000,00** | **86,66** | **289.550.000** | **17.100.000** | **5,91** |

| | Anggaran TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **2). Belanja Daerah** | **33.167.963.679,00** | **31.198.991.623,00** | **25.373.119.309,00** |

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa. Realisasi belanja dan transfer tahun 2021 sebesar Rp. **31.198.991.623,00** Realisasinya mencapai 94.06% dari anggaran sebesar Rp. **33.167.963.679,00** Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja dan transfer Tahun 2021 Naik 23%.

| | Anggaran TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **A) Belanja Operasi** | **32.255.547.556,00** | **30.405.305.823,00** | **25.086.851.709,00** |

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dengan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 3.2 : Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020**

| No | Belanja Operasi | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 12.170.905.981,00 | 12.097.485.680,00 | 99,40 | 12.930.658.422,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.010.601.956,00 | 13.394.634.725,00 | 89,23 | 8.910.115.787,00 |
| 3 | Belanja Hibah | 5.074.039.619,00 | 4.913.185.418,00 | 96,83 | 3.246.077.500,00 |
| | **Jumlah** | **32.255.547.556,00** | **30.405.305.823,00** | **94,26** | **25.086.851.709,00** |

| | Anggaran TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **(a) Belanja Pegawai** | **12.170.905.981,00** | **12.097.485.680,00** | **12.930.658.422,00** |

Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, serta pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD..

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

**Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 dan 2020**

| No | Rincian Belanja Pegawai | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |
| 1 | Gaji Pokok ASN | 5.991.588.829,00 | 5.984.999.204,00 | 99,89 | 6.346.485.073,00 |
| 2 | Tunjangan Keluarga ASN | 645.559.212,00 | 635.570.192,00 | 98,45 | 678.351.848,00 |
| 3 | Tunjangan Jabatan ASN | 306.979.994,00 | 300.170.000,00 | 97,78 | 282.365.000,00 |
| 4 | Tunjangan Fungsional ASN | 606.017.493,00 | 599.670.000,00 | 98,95 | 688.110.000,00 |
| 5 | Tunjangan Fungsional Umum ASN | 60.729.806,00 | 60.410.000,00 | 99,47 | 68.880.000,00 |
| 6 | Tunjangan Beras ASN | 363.445.805,00 | 360.289.500,00 | 99,13 | 326.686.620,00 |
| 7 | Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN | 17.342.346,00 | 16.461.374,00 | 94,92 | 18.038.295,00 |
| 8 | Pembulatan gaji ASN | 86.394,00 | 79.631,00 | 92,17 | 86.983,00 |
| 9 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 12.815.110,00 | 12.294.207,00 | 95,94 | 52.238.034,00 |
| 10 | Iuran Jaminan Kematian ASN | 37.445.373,00 | 36.882.723,00 | 98,50 | |
| | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | |
| 11 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 4.072.454.029,00 | 4.039.118.229,00 | 99,18 | 4.305.604.994,00 |
| | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | |
| 12 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 12.545.770,00 | 12.544.800,00 | 99,99 | 12.512.375,00 |
| | **BELANJA LANGSUNG** | | | | |
| 1 | Honorarium ..... | | | | 120.732.200,00 |
| 2 | Uang lembur ..... | | | | 29.067.000,00 |
| | **JUMAH BELANJA PEGAWAI** | **12.127.010.161,00** | **12.058.489.860,00** | **99,43** | **12.930.658.422,00** |

| | Anggaran TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **(b) Belanja Barang dan Jasa** | **15.010.601.956,00** | **13.394.634.725,00** | **12.156.193.287,00** |

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3.4 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021 dan 2020**

| No. | Belanja Barang dan Jasa | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Persediaan | 8.312.208.481,00 | 7.538.434.203,00 | 90,69 | 1,797,246,525 |
| 2 | Belanja Jasa | 5.094.822.610,00 | 4.714.603.554,00 | 92,54 | 6,345,415,811 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 402.681.102,00 | 390.716.300,00 | 97,03 | 237,945,396 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.200.889.763,00 | 750.880.668,00 | 62,53 | 515.753.055 |
| 5 | Belanja Lainnya | 0,00 | 0,00 | - | 3,259,832,500 |
| | **Jumlah** | **15.010.601.956,00** | **13.394.634.725,00** | **89,23** | **12.156.193.287** |

### (1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 7.538.434.203,00** terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.5 Realisasi Belanja Persediaan tahun 2021**

| No. | Belanja Barang | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 931.020.854,00 | 827.929.300,00 |
| 2 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 52.942.000,00 | 52.530.184,00 |
| 3 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 207.100.000,00 | 197.550.000,00 |
| 4 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 376.195.850,00 | 158.516.300,00 |
| 5 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 249.967.855,00 | 224.006.989,00 |
| 6 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 140.796.956,00 | 114.892.030,00 |
| 7 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 8 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3.186.150,00 | 2.896.500,00 |
| 9 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 10.469.250,00 | 8.396.500,00 |
| 10 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 11 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 82.156.066,00 | 73.907.900,00 |
| 12 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 5.521.925.500,00 | 5.476.925.500,00 |
| 13 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4.180.000,00 | 4.175.000,00 |
| 14 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 2.433.000,00 | 2.433.000,00 |
| 15 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 726.135.000,00 | 390.575.000,00 |
| | **Jumlah** | **8.312.208.481,00** | **7.538.434.203,00** |

### (2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; iuran jaminan/asuransi; sewa peralatan dan mesin; sewa gedung dan bangunan; konsultansi konstruksi; kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp**. 4.714.603.554,00** dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.6 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021 dan 2020**

| No | Belanja jasa | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Jasa Kantor | 4.608.327.610,00 | 4.283.276.040,00 | 92,95 | 1.618.376.597,00 |
| 2 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 250.920.000,00 | 210.644.604,00 | 83,95 | 199.501.214,00 |
| 3 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 9.800.000,00 | 8.000.000,00 | 81,63 | - |
| 4 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 19.000.000,00 | 10.000.000,00 | 52,63 | 5.300.000,00 |
| 5 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 179.400.000,00 | 176.899.910,00 | 98,61 | - |
| 6 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 27.375.000,00 | 25.783.000,00 | 94,18 | 8.000.000,00 |
| 7 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | - | - | - | 9.450.000,00 |
| 8 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan | - | - | - | 23.390.000,00 |
| 9 | Belanja Makan dan Minuman | - | - | - | 547.790.000,00 |
| 10 | Belanja Upah/ Ongkos Tenaga Kerja | - | - | - | 3.933.608.000,00 |
| | **Jumlah** | **5.094.822.610,00** | **4.714.603.554,00** | **92,54** | **6.345.415.811,00** |

**(3) Belanja Pemeliharaan**

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 390.716.300,00** terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.7 : Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021**

| No | Belanja Pemeliharaan | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 119.830.625,00 | 117.219.300,00 | 97,82 | 237.945.396,00 |
| 2 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 282.850.477,00 | 273.497.000,00 | 96,69 | - |
| | **Jumlah** | **402.681.102,00** | **390.716.300,00** | **97,03** | **237.945.396,00** |

**(4) Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 750.880.668,00** terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.8 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021**

| No. | Belanja Perjalanan Dinas | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 168.456.900,00 | 112.775.668,00 | 66,95 | 242.828.055,00 |
| 2 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.030.932.863,00 | 636.605.000,00 | 61,75 | 272.925.000,00 |
| 3 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100 | |
| | **Jumlah** | **1.200.889.763,00** | **750.880.668,00** | **62,53** | **515.753.055,00** |

**(5) Belanja Lainnya**

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp 0,00** terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.9 Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2021**

| No | Belanja Lainnya | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Barang Bekas Dipakai | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | **Jumlah** | 0,00 | 0,00 |

| | Anggaran TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **(c) Belanja Hibah** | **5.074.039.619,00** | **4.913.185.418,00** | **3.246.077.500,00** |

Belanja hibah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau dari pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Belanja hibah dapat berbentuk uang, barang, dan / atau jasa. Rincian realisasi belanja hibah tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut.

**Tabel 3.10 Realisasi Belanja Hibah tahun 2021 dan 2020**

| No. | Belanja Hibah | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | - | 3.246.077.500,00 |
| 2 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 3.987.596.000,00 | 3.985.320.050,00 | 99,94 | - |
| 3 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 1.086.443.619,00 | 927.865.368,00 | 85,40 | - |
| | **Jumlah** | **5.074.039.619,00** | **4.913.185.418,00** | **96,83** | **3.246.077.500,00** |

| | Anggaran TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2021 (Rp) | Realisasi TA 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **B) Belanja Modal** | **912.416.123,00** | **793.685.800,00** | **286.267.600,00** |

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 793.685.800,00** terinci sebagai berikut:

**Tabel 3.11 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020**

| No | Jenis Belanja Modal | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 185.565.800,00 | 70.215.800,00 | 37,84 | 28.642.100,00 |
| 2 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 115.000.000,00 | - | - | - |
| 3 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100 | - |
| 4 | Belanja Modal Komputer | 61.565.800,00 | 61.315.800,00 | 99,59 | - |
| 5 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 578.285.323,00 | 574.905.000,00 | 99.42 | 198.882.500,00 |
| 6 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - | 208,926,000 |
| 7 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 148.565.000,00 | 148.565.000,00 | 100 | - |
| 8 | Belanja Modal Aset Lainnya | - | - | - | 58.743.000,00 |
| | **Jumlah** | **912.416.123,00** | **793.685.800,00** | **86,99** | **286.267.600,00** |

## 3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

### a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

**Tabel 3.12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020**

| Keterangan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|---|---|
| Kas di bendahara pengeluaran | 0,- | 0,- |
| Kas di bendahara penerimaan | 0,- | 0,- |
| Kas lainnya | 0,- | 0,- |
| Piutang pajak | 0,- | 0,- |
| Piutang retribusi | 0,- | 0,- |
| Biaya Dibayar Dimuka | 0,- | 0,- |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 24.750.000,00 | 24.750.000,00 |
| Persediaan | 52.747.382,00 | 90.192.702,00 |
| **Jumlah** | **77.497.382,00** | **114.942.702,00** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **a) Kas di Bendahara Pengeluaran** | **0,00** | **0,00** |

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.13 Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 dan 2020**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Saldo 31 Desember 2020 | | - |
| 2. Peneriman : | | |
| - SP2D UP | 200.000.000,00 | |
| - SP2D TUP | 1.455.609.000,00 | |
| - SP2D GU | - | |
| - Penerimaan PFK | - | |
| Jumlah Penerimaan | | 1.655.609.000,00 |
| 3. Pengeluaran : | | |
| - SPJ UP/GU | - | |
| - SPJ GU Nihil | 154.429.970,00 | |
| - Setor kembali sisa TUP | 139.135.556,00 | |
| - Setor kembali sisa UP/GU | 555.809.730,00 | |
| - TU NIHIL | 806.233.744,00 | |
| Jumlah pengeluaran | | 1.655.609.000,00 |
| 4. Saldo 31 Desember 2021 | | 0,00 |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **b) Kas di Bendahara Penerimaan** | **0-,** | **0-,** |

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

**Tabel 3.14 Rincian saldo kas di bendahara penerimaan tahun 2021**

| Bulan | Saldo awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Januari | - | 21.000.000 | 21.000.000 | - |
| Pebruari | - | 18.935.000 | 18.935.000 | - |
| Maret | - | 24.845.000 | 24.845.000 | - |
| April | - | 22.730.000 | 22.730.000 | - |
| Mei | - | 33.140.400 | 33.140.400 | - |
| Juni | - | 21.085.000 | 21.085.000 | - |
| Juli | - | 254.705.000 | 254.705.000 | - |
| Agustus | - | 22.065.000 | 22.065.000 | - |
| September | - | 34.805.000 | 34.805.000 | - |
| Oktober | - | 20.515.000 | 20.515.000 | - |
| Nopember | - | 21.155.000 | 21.155.000 | - |
| Desember | - | 78.110.000 | 78.110.000 | - |
| Jumlah | - | **573.090.400** | **573.090.400** | - |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **c) Kas Lainnya** | **0-,** | **0-,** |

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per 31 Desember 2021 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.15 Mutasi kas lainnya tahun 2021 dan 2020**

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Dana BOS | Rp..... | Rp..... |
| 2 | Pengeluaran Belanja BOS : | | |
| 3 | Belanja Pegawai | Rp..... | Rp..... |
| 4 | Belanja Barang dan Jasa | | |
| 5 | - Belanja Persediaan | Rp..... | Rp..... |
| 6 | - Belanja Jasa | Rp..... | Rp..... |
| 7 | - Belanja Pemeliharaan | Rp..... | Rp..... |
| 8 | - Belanja Perjalanan Dinas | Rp..... | Rp..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | - Belanja Lainnya | Rp..... | Rp..... |
| 10 | Jumlah Belanja Barang dan Jasa (5 s/d 9) | Rp..... | Rp..... |
| 11 | Belanja Modal | Rp..... | Rp..... |
| 12 | Jumlah Pengeluaran (3+10+11) | Rp..... | Rp..... |
| 13 | Sisa Dana BOS tahun berjalan (1(12) | Rp..... | Rp..... |
| 14 | Saldo Dana BOS Tahun Lalu | Rp..... | Rp..... |
| 15 | Pendapatan bunga bank | Rp..... | Rp..... |
| 16 | Biaya admin bank | (Rp.....) | (Rp.....) |
| 17 | Saldo Kas Lainnya per 31 Des. (13+14+15+16) | Rp..... | Rp..... |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **f) Piutang Lainnya** | **24.750.000,00** | **24.750.000,00** |

Saldo piutang lain-lain pad yang sah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. **24,750,000,-** dan Rp. **24,750,000,-** terinci sebagai berikut.

| | 31 Des 2021 | 31 Des 2020 |
|---|---|---|
| Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah | **24.750.000,00** | **24.750.000,00** |
| Jumlah | **24.750.000,00** | **24.750.000,00** |

Berdasarkan saldo piutang lain-lain pad yang sah per 31 Desember 2021 masih tercatat Rp. Rp. 24,750,000,- hal ini disebabkan adanya perjanjian sewa yang tidak terpenuhi oleh pihak penyewa dikarenakan pihak penyewa pindah ke luar Jawa..

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **g) Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | **(24.750.000,00)** | **(24.750.000,00)** |

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2021, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. **(24.750.000,00)** dan per 31 Desember 2020 Rp. **(24.750.000,00)** untuk setiap jenis piutang.

**Tabel 3.16 Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2021**

| Penyisihan Piutang | Saldo Akhir 31 Des 20 | Koreksi tahun Berjalan | Mutasi Bertambah (Berkurang) | Saldo Akhir 31 Des 21 |
|---|---|---|---|---|
| **PENYISIHAN PIUTANG PAJAK** | | | | |
| Penyisihan Piutang Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyisihan Piutang Retribusi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyisihan Piutang lainnya | (24,750,000) | 0 | 0 | (24,750,000) |
| Dst.... | - | - | - | - |
| **JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIIH (1+2+3)** | (24,750,000) | 0 | 0 | (24,750,000) |

Penyisihan piutang tak tertagih akibat adanya perjanjian sewa yang tidak terpenuhi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, tahun 2021.

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **h) Persediaan** | **52.747.382,00** | **90.192.702,00** |

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur

sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

**Tabel 3.17 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021**

| No | Uraian | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 1 | Persediaan per 31 Desember 2020 | | 90.192.702,00 |
| 2 | Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal | | +/- 0 |
| 3 | Saldo persediaan setelah koreksi (1+2) | | 90.192.702,00 |
| **4** | **Ditambah :** | | |
| 5 | Belanja Persediaan LRA 2021 | 52.747.382,00 | |
| 6 | Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja) | 0 | |
| 7 | Belanja Persediaan BOS | 0 | |
| 8 | Penerimaan hibah persediaan | 0 | |
| 9 | Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8) | 52.747.382,00 | |
| **10** | **Dikurangi :** | | |
| 11 | Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2020 | 0 | |
| 12 | Pengeluaran hibah persediaan | 0 | |
| 13 | Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12) | | 0 |
| 14 | Jumlah persediaan yang siap digunakan | | 52.747.382,00 |
| 15 | Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional) | | - |
| 16 | Persediaan tahun 2021 (14+15) | | 52.747.382,00 |

**Tabel 3.18. Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| No | Persediaan | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Persediaan Alat Tulis Kantor | 3.218.600,00 | 3.781.525,00 |
| 2 | Persediaan Bahan Cetak | 1.704.772,00 | 2.619.742,00 |
| 3 | Persediaan Alat Listrik | 857.400,00 | 1.453.000,00 |
| 4 | Persediaan Bahan Lainnya | 613.600,00 | 1.407.000,00 |
| 5 | Persediaan Obat-obatan | 12.852.400,00 | - |
| 6 | Persediaan Bibit Hewan/ Ternak | 33.500.610,00 | 80.931.435,00 |
| | **Jumlah** | **52.747.382,00** | **90.192.702,00** |

## b. ASET TETAP

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **1) Aset Tetap** | **28.317.830.696,10** | **29.356.178.181,57** |

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan

aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.19 Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021**

| No | Uraian | Saldo Awal 1 Jan 2021 | Koreksi | Mutasi | | Saldo 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tanah | 7.766.808.367,00 | | - | 177.581.000,00 | 7.589.227.367,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 12.929.412.407,35 | | 69.315.800,00 | - | 12.998.728.207,35 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 27.898.391.957,37 | | 566.725.000,00 | 159.652.088,40 | 28.305.464.868,97 |
| 4 | Jalan, Irigrasi, dan Jaringan | 509.363.400,00 | | - | - | 509.363.400,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 375.325.400,00 | | - | - | 375.325.400,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 57.103.000,00 | | - | 57.103.000,00 | - |
| | **Jumlah** | **49.536.404.531,72** | | **636.040.800,00** | **394.336.088,40** | **49.778.109.243,32** |

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut :

- Koreksi kurang catat Rp. 0,-
- Koreksi lebih catat Rp. 0,-0

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 636.040.800,00

b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp. 394.336.088,40

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(a) Tanah** | **7.589.227.367** | **7.766.808.367** |

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. **7.589.227.367** dan **Rp. 7.766.808.367** dan mengalami penurunan nilai pada asset tanah pada tahun 2021 terinci sebagai berikut :

**Tabel .3.20 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020**

| No | Uraian | Saldo Awal 31 Des 2020 | Koreksi | Mutasi | | Saldo 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Gucialit | 37.550.000 | | | | 37.550.000 |
| 2 | Tanah Pertanian | 300.000.000 | | | | 300.000.000 |
| 3 | Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Randuagung | 80.777.000 | | | | 80.777.000 |
| 4 | Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Yosowilangun | 472.979.167 | | | | 472.979.167 |
| 5 | Tanah Pertanian/Kebun Dinas | 162.350.000 | | | | 162.350.000 |
| 6 | Tanah Pertanian/Kebun Dinas | 196.850.000 | | | | 196.850.000 |
| 7 | Tanah Pertanian/Kebun Dinas | 285.683.333 | | | | 285.683.333 |
| 8 | Tanah Kebun Dinas /Tegalan | 516.100.000 | | | | 516.100.000 |
| 9 | Tanah Kebun Dinas/Tegalan | 87.339.167 | | | | 87.339.167 |
| 10 | Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Pronojiwo | 823.113.333 | | | | 823.113.333 |
| 11 | Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Kedungjajang | 139.995.000 | | | | 139.995.000 |

| No | Uraian | Saldo Awal 31 Des 2020 | Koreksi | Mutasi | | Saldo 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Tanah Pertanian | 456.687.500 | | | | 456.687.500 |
| 13 | Tanah Pertanian/Kebun | 829.152.200 | | | | 829.152.200 |
| 14 | Tanah Bangunan Scren House | 239.572.000 | | | | 239.572.000 |
| 15 | Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Sukodono | 99.824.000 | | | | 99.824.000 |
| 16 | Tanah Kantor dan Rumah Dinas | 177.581.000 | | | 177.581.000 | 0 |
| 17 | Tanah Kantor dan Rumah Dinas | 142.272.000 | | | | 142.272.000 |
| 18 | Tanah Lap. Desa Sumberjati | 477.141.667 | | | | 477.141.667 |
| 19 | Tanah UPT-BPP Kec. Kunir | 1.048.265.000 | | | | 1.048.265.000 |
| 20 | Tanah Rumah Potong Hewan / Jatiroto | 323.314.500 | | | | 323.314.500 |
| 21 | Tanah Puskeswan / Kunir | 16.294.500 | | | | 16.294.500 |
| 22 | Tanah Rumah Potong Hewan / Klakah | 22.797.000 | | | | 22.797.000 |
| 23 | Tanah Rumah Potong Hewan / Yosowilangun | 103.785.500 | | | | 103.785.500 |
| 24 | Tanah Rumah Potong Hewan / Tempeh | 6.380.500 | | | | 6.380.500 |
| 25 | Tanah Rumah Potong Hewan / Candipuro | 19.584.000 | | | | 19.584.000 |
| 26 | Tanah Puskeswan / Pasirian | 227.060.000 | | | | 227.060.000 |
| 27 | Tanah Rumah Potong Hewan / Lumajang | 452.880.000 | | | | 452.880.000 |
| 28 | Tanah Rumah Potong Hewan / Pasirian | 9.480.000 | | | | 9.480.000 |
| 29 | Tanah Puskeswan Kedungjajang | 12.000.000 | | | | 12.000.000 |
| | **Jumlah** | **7.766.808.367** | | | **177.581.000** | **7.589.227.367** |

*Selanjutnya dijelaskan :*

- *Pada tahun 2021 pada asset tanah mengalami pengurangan/penurunan nilai asset. Pengurangan aset tetap tanah dari Tanah Kantor dan Rumah Dinas yang terletak di BPP Pronojiwo Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang mutasi ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dengan nilai perolehan sejumlah Rp 177.581.000,- hal ini dikarenakan adanya kesalahan pencatatan Aset Tetap (Tanah) milik Provinsi Jawa Timur dicatat sebagai aset tetap (tanah) Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.*

- Legalitas Tanah Dinas Pertanian

  Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 11 bidang dari keseluruhan 29 bidang dengan rincian sebagai berikut:

| NO | Sertifikat | Sudah | Belum | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidang | 18 | 11 | 29 |
| 2 | Luas (m2) | 130.788 | 216.522 | 347.310 |
| 3 | Nilai (Rp) | 4.703.272.500 | 3.063.535.867 | 7.766.808.367 |
| 4 | Tanah Bermasalah | • 18 Bidang tanah sudah bersertifikat<br>• 11 Bidang tanah masih proses | | |

Juga jelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan aset tetap tanah

- Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat 18 Bidang
  a. Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Pronojiwo
  b. Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Sukodono
  c. Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Yosowilangun
  d. Tanah Kebun Dinas /Tegalan
  e. Tanah Pemerintah Kab. Lumajang (Tanah Kebun Dinas Argosari )
  f. Tanah UPT-BPP Kec. Kunir
  g. Tanah Puskeswan / Kunir
  h. Tanah Rumah Potong Hewan / Candipuro
  i. Tanah Rumah Potong Hewan / Klakah
  j. Tanah Rumah Potong Hewan / Lumajang
  k. Tanah Rumah Potong Hewan / Pasirian
  l. Tanah Rumah Potong Hewan / Tempeh
  m. Tanah Rumah Potong Hewan / Yosowilangun
  n. Tanah Kebun Dinas /Tegalan
  o. Tanah Kebun Dinas/Tegalan
  p. Tanah Pertanian/Kebun Dinas
  q. Tanah Pertanian/Kebun Dinas
  r. Tanah Pertanian/Kebun Dinas
- Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat 11 Bidang
  a. 1 Bidang tanah berkurang (Tanah Kantor dan Rumah Dinas yang terletak di BPP Pronojiwo Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang)
  b. 6 Bidang tanah masih proses di BPN
     - Tanah kantor UPT-BPP Kec. Gucialit (Ds. Pakel Kec. Gucialit)
     - Tanah Pertanian (Ds. Wonokerto Kec. Tekung)
     - Tanah Pertanian/Kebun (Ds. Kebonan Kab. Randuagung)
     - Tanah Puskeswan/Pasirian (Ds. Condro Kec. Pasirian)
     - Tanah Kantor UPT-BPP Kec. Randuagung (Ds. Gedang Mas Kec. Randuagung)
     - Tanah Kantor dan Rumah Dinas (Ds. Sumberjati Kec. Tempeh)
  c. 4 bidang tanah masih penelusuran
     - Tanah Pertanian (Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko)
     - Tanah Lap. Ds. Sumberjati ( Ds. Sumberjati Kec. Tempeh)
     - Tanah RPH/Jatiroto (Ds. Jatiroto Kec. Jatiroto)
     - Tanah Puskeswan Kedungjajang (Ds. Curah Petung Kec. Kedungjajang)

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(b) Peralatan dan Mesin** | **12.998.728.207,35** | **12.924.662.407,35** |

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. **12.998.728.207,35** dan Rp. **12.924.662.407,35** terinci sebagai berikut :

**Tabel .3.21 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021**

| No | Peralatan dan mesin | Saldo Awal 31 Des 2020 | Koreksi | Mutasi | | Saldo 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Alat-alat besar | 421.342.500 | - | | | 421.342.500 |
| 2 | Alat-alat Angkutan | 3.658.395.407,55 | - | | | 3.658.395.407,55 |
| 3 | Alat-alat bengkel dan Alat Ukur | 564.441.000,00 | - | | | 564.441.000,00 |
| 4 | Alat-alat Pertanian | 2.593.979.546,08 | - | | | 2.593.979.546,08 |
| 5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 2.990.549.923,72 | - | 9.950.000,00 | | 3.000.499.923,72 |
| 6 | Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 87.367.500,00 | - | | | 87.367.500,00 |
| 7 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 221.675.000,00 | | | | 221.675.000,00 |
| 8 | Alat-alat Laboratorium | 233.690.830,00 | - | | | 233.690.830,00 |
| 9 | Komputer | 2.103.720.700,00 | | 59.365.800,00 | | 2.163.086.500,00 |
| 10 | Alat Keselamatan Kerja | 49.500.000,00 | - | | | 49.500.000,00 |
| 11 | Peralatan Olahraga | - | 4.750.000,00 | | | 4.750.000,00 |
| | **Jumlah** | **12.924.662.407,35** | **4.750.000,00** | **69.315.800,00** | **-** | **12.998.728.207,35** |

***Selanjutnya jelaskan :***

- ***Koreksi aset tetap peralatan dan mesin karena ada perubahan rekening dari KIB E ke KIB B senilai Rp. 4.750.000,00.***
- ***Penambahan aset tetap peralatan dan mesin diperoleh dari transaksi Pembelian Aset di Tahun 2021 senilai Rp. 69.315.800,00,- .***

Juga jelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan aset tetap peralatan dan mesin

Contoh :

- Jumlah peralatan dan mesin yang rusak berat
- Dll

| | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2021 (Rp) |
|---|---|---|
| **(c) Gedung dan Bangunan** | **28.305.464.868,97** | **27,898.391.957,37** |

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2021 sebagai berikut.

**Tabel 3.22 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

| No | Gedung dan Bangunan | Saldo Awal 31 Des 2020 | Koreksi | Mutasi | | Saldo 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bangunan Gedung | 27.888.391.957,37 | - | 566.725.000,00 | 159.652.088,40 | 28.295.464.868,97 |
| 2 | Monumen | 10.000.000,00 | - | | - | 10,000,000.00 |
| | **Jumlah** | **27.898.391.957,37** | **-** | **566.725.000,00** | **159.652.088,40** | **28.305.464.868,97** |

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut :

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp. 0,-
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. 0,-

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 566.725.000,00 meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 566.725.000,00
- Penambahan Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan Ke Aset Tetap Gedung Bangunan karena Perencanaan Pengerjaan Telah Selesai Dikerjakan sebesar Rp. 0,-
- Penambahan dari belanja barang Rp. 0,-

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp. 159.652.088,40 sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp. 159.652.088,40
  - Pengurangan gedung dan bangunan karena adanya mutasi keluar aset tetap gedung Laboratorium UPT-BPP Kec. Klakah ke Dinas PUTR senilai Rp. 159.652.088,40 (terdiri dari nilai Gedung sebesar Rp. 140.698.567,43 dan nilai penyusutannya sebesar Rp. 18.953.520,97)
- Pengurangan Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan karena masih Dalam Perencanaan Pembangunan senilai Rp. 0,-

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(d) Jalan, Irigasi & Jaringan** | **509,363,400** | **509,363,400** |

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.23 Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021**

| No | Jenis | Saldo Awal 31 Desember 2020 | Koreksi | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalan | - | - | - | - | - |
| 2 | Jembatan | - | - | - | - | - |
| 3 | Bangunan Air/Irigasi | 429,630,000 | - | - | - | 429,630,000 |
| 4 | Instalasi | 79,733,400 | - | - | - | 79,733,400 |
| 5 | Jaringan | | - | - | - | |
| | **Jumlah** | **509,363,400** | - | - | - | **509,363,400** |

Koreksi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena kurang catat sebesar Rp. 0,-
- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena lebih catat sebesar Rp. 0,-

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 0,-meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 0,-
- Penambahan dari hibah Rp. 0,-
- Penambahan dari belanja barang Rp. 0,-

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 0,- sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp. 0,-

| | | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **(e)** | **Aset Tetap Lainnya** | **375.325.400,00** | **375.325.400,00** |

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 20202 masing-masing sebesar Rp. **375.325.400,00** dan tidak mengalamai perubahan nilai asset baik dari penambahan maupun pengurangan, adapun daftar aset tetap lainnya sebagai berikut.

**Tabel 3.24 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

| No | Jenis | 31 Des 2020 | Koreksi | Penambahan | Pengurangan | 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku dan Pepustakaan | 375.075.399,00 | - | - | - | 375.075.399,00 |
| 2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga | 250.000,00 | - | - | - | 250.000,00 |
| | **Jumlah** | **375.325.400,00** | **-** | **-** | **-** | **375.325.400,00** |

Perubahan saldoAset Tetap Lainnya selama tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp. 0,- berasal dari:

- Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari APBD tahun 2021 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut.
- Hibah buku berasal dari ..... sebesar Rp. 0,-

| | | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|
| **(f)** | **Konstruksi Dalam Pengerjaan** | **0,00** | **57.103.000,00** |

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 57.103.000,00 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

**Tabel 3.25 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

| NO | JENIS | 31 DES 2020 | KOREKSI | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | 31 DES 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontruksi Dalam Pengerjaan | 57.103.000 | | - | 57.103.000 | 0 |
| | | | | | | |
| | **Jumlah** | **57.103.000** | | **-** | **57.103.000** | **0** |

- Penambahan Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan karena masih Dalam Perencanaan Pembangunan senilai Rp. 0,-
- Pengurangan Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan Ke Aset Tetap Gedung Bangunan karena Perencanaan Pengerjaan Telah Selesai Dikerjakan sebesar Rp. 57.103.000-

## s. ASET LAINNYA

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **1) Aset Lainnya** | **1.492.113.205,00** | **1.400.090.805,00** |

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. **1.492.113.205,00** sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **1.400.090.805,00** terinci sebagai berikut :

**Tabel 3.26 Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

| No | Jenis | 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aset Tak Berwujud | 183.917.500,00 | 148.565.000,00 | - | 332.482.500,00 |
| 2 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | (115.847.100,00) | (56.542.600,00) | - | (172.389.700,00) |
| 3 | Aset Lain lain | 1.332.020.405,00 | - | - | 1.332.020.405,00 |
| | **Jumlah** | **1.400.090.805,00** | **92.022.400,00** | **-** | **1.492.113.205,00** |

- Penambahan Aset Lainnya karena Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp. (56.542.600,00)
- Penamabahan Aset Tak Berwujud karena adanya penambahan dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 148.565.000,00,- , penjelasan sebagai berikut:
  - Penamabahan Aset Tak Berwujud karena adanya penambahan dari realisasi yaitu penyusunan kajian nilai pertanian pada wilayah IPDMIP Kab. Lumajang senilai Rp. 100.000.000,- dan belanja aplikasi kartu ternak senilai Rp. 48.565.000,-
- Pengurangan Aset Lainnya berkurang karena Penghapusan Sesuai dengan SK Pengapusan Tahun 2021 senilai Rp. 0,-

## t. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 523.121.283,33 dan Rp. 488.325.532,66 diuraikan sebagai berikut.

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **1) Kewajiban Jangka Pendek** | **523.121.283,33** | **488.325.532,66** |

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 523.121.283,33 dan Rp. 488.325.532,66 Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(a) Pendapatan Diterima Dimuka** | **155.833.333,33** | **105.566.666,67** |

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2021 dan 2020 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp. 155.833.333,33 dan Rp. 105.566.666,67 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah kebun dinas. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

**Tabel 3.27 Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020**

| No | Jenis | 31 Desember 2020 | Penambahan | pengurangan | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Sewa | 105,566,666.67 | 233.750.000,00 | 183.483.333,33 | 155.833.333,33 |
| | **Jumlah** | **105,566,666.67** | **233.750.000,00** | **183.483.333,33** | **155.833.333,33** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(b) Utang Belanja** | **367.287.950,00** | **382.758.866** |

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. **367.287.950,00** terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. **322.872.748,00** utang belanja jasa Rp**. 44.415.202,00** dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. **0,-** sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel 3.28 Rincian Utang Tahun 2021**

| No | Jenis Utang | 31 Des 2020 | Penambahan | Pengurangan | 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utang Belanja pegawai | 346.603.556 | 322.872.748,00 | 346.603.556 | 322.872.748,00 |
| 2 | Utang Belanja Jasa | 36.155.310 | 44.415.202,00 | 36.155.310 | 44.415.202,00 |
| 3 | Utang Belanja Pemeliharaan | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| 4 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| 5 | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| | **Jumlah** | **382.758.866,00** | **367.287.950,00** | **382.758.866,00** | **367.287.950,00** |

**Utang Belanja Pegawai**

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar **Rp**. **322.872.748,00** merupakan kewajiban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi serta kekurangan uang makanan dan minuman PNS yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021.

**Tabel 3.29 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021**

| No | Jenis Utang | 31 Des 2020 | Penambahan 2021 | Pengurangan 2021 | 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utang Jasa layanan Kesehatan | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| 2 | Utang Uang Makan | 0,- | - | 0,- | 0,- |
| 3 | Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 346.603.556 | 322.872.748 | 346.603.556 | 322.872.748 |
| | **Jumlah** | **346.603.556** | **322.872.748** | **346.603.556** | **322.872.748** |

**Utang Belanja Jasa**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 44.415.202,00** merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

**Tabel 3.30 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2021**

| No | Jenis Utang | 31 Des 2020 | Penambahan 2021 | Pengurangan 2021 | 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa listrik | 19.729.951 | 22.026.039,00 | 19.729.951 | 22.026.039,00 |
| 2 | Jasa telepon | 734.109 | 729.459,00 | 734.109 | 729.459,00 |
| 3 | PDAM | 1.900.850 | 1.973.600,00 | 1.900.850 | 1.973.600,00 |
| 4 | Beban kawat/faksimili/internet | 11,607,000 | 19.686.104,00 | 11,607,000 | 19.686.104,00 |
| 5 | Utang Belanja STNK Kendaraan Dinas/Operasional | - | | - | |
| | **Jumlah** | **36.155.310** | **44.415.202,00** | **36.155.310** | **44.415.202,00** |

## u. EKUITAS

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **1) Ekuitas** | **29.339.569.999,77** | **30.358.136.155,91** |

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3.31 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| No | Akun | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Aset | 29.862.691.283,10 | 30.846.461.688,57 |
| 2 | Jumlah Kewajiban | 523.121.283,33 | 488.325.532,66 |
| 3 | Ekuitas | **29.339.569.999,77** | **30.358.136.155,91** |

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

**Tabel 3.32. Daftar Rincian Ekuitas Dinas Pertanian per 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekuitas Awal | 30.358.136.155,91 | 30.956.699.546,78 |
| 2 | Surplus (Defisit) LO | (31.322.087.811,71) | (26.442.892.902,72) |
| 3 | Dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi / kesalahan mendasar | (182.331.000,00) | - |
| 4 | Lain-lain | - | - |
| 5 | (RK-PPKD) | 30.485.852.655,57 | 24.835.816.909,00 |
| **6** | **EKUITAS AKHIR** | **29.339.569.999,77** | **30.358.136.155,91** |

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

## 3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### a. Pendapatan LO

### 1) Pendapatan Asli Daerah – LO

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **a) Pendapatan Retribusi Daerah LO** | **266.440.400,00** | **247.752.400,00** |

Pendapatan retribusi daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.33 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| No | Nama Akun | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Retribusi Jasa Usaha-LO** | **266.440.400** | **247.752.400** |
| | Retribusi pemakaian kekayaan daerah-LO | 680.400 | 680.400 |
| | Retribusi rumah potong hewan-LO | 265.760.000 | 247.072.000 |
| | **Jumlah** | **266.440.400** | **247.752.400** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO** | **680.400** | **680.400** |

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel 3.34. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| NO | Uraian | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 680.400 | 680.400 |
| | **Jumlah** | **680.400** | **680.400** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(2) Retribusi rumah potong hewan LO** | **265.760.000** | **247.752.400** |

Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan sudah diterima sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinas Pertanian), masing masing sebesar Rp. **265.760.000** dan Rp. **247.752.400** terdiri dari:

**Tabel 3.35. Perhitungan Retribusi Rumah Potong Hewan LRA dan LO Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| No | Jenis | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| I | Dinas Pertanian | | |
| 1 | Sapi Usaha | 265.760.000 | 247.752.400 |
| 2 | Kambing | - | - |
| | **Jumlah** | **265.760.000** | **247.752.400** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO** | **256.383.333,33** | **287.816.666,67** |

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang menjadi hak Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel 3.37. Daftar Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Per 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| No | Nama Akun | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO** | **72.000.000,00** | **103.200.000** |
| | Hasil Penjualan Tanaman | 72.000.000,00 | 103.200.000 |
| **2** | **Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO** | **184.383.333,33** | **177.116.666,67** |
| | Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD | 184.383.333,33 | 177.116.666,67 |
| | **Jumlah** | **256.383.333,33** | **280.316.666,67** |

**Tabel 3.38. Hubungan Lain-lain PAD yang sah LRA dan LO tahun 2021**

*dalam rupiah*

| Uraian | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|
| Lain-lain PAD yang Sah LRA | | **306.650.000,00** |
| DITAMBAH : | | |
| a. Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa 6 Bidang Tanah Tahun 2020 Sudah Menjadi Hak di Tahun 2021 (Dinas Pertanian) | 233.750.000,00 | |
| **Jumlah Penambahan** | | **233.750.000,00** |
| DIKURANGI : | | |
| 1) Pendapatan di terima dimuka atas sewa tanah 2021 (Dinas Pertanian) | (183.483.333,33) | |
| **Jumlah Pengurangan** | | **(183.483.333,33)** |
| **Lain-lain PAD Yang Sah – LO** | | **256.383.333,33** |

Adanya perbedaan nilai antara PAD LRA Rp. 306.650.000,00 dengan PAD LO Rp. 256.383.333,33 karena adanya pengurangan nilai pada sewa tanah LO (pendapatan diterima dimuka pada tahun berjalan).

## b. BEBAN

| | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|---|---|---|
| **1) Beban Pegawai-LO** | **12.073.754.872,00** | **12.920.655.097,00** |

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel 3.39. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2021**

*dalam rupiah*

| Uraian | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Belanja Gaji Pegawai LRA | 12.097.485.680,00 | 12.930.658.422 |
| **DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar** | | |
| Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji susulan | | |
| Tunjangan Uang makan 2021 belum di bayar | | |
| Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (utang belanja) | 322.872.748,00 | 346.603.556 |
| **DIKURANGI :** | | |
| Bayar Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (utang belanja) | 346.603.556,00 | 356,606,881 |
| **Jumlah Belanja Pegawai LO** | **12.073.754.872,00** | **12.920.655.097** |

**Tabel 3.40. Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

*dalam rupiah*

| No | SKPD | Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai | Lembur Belum di bayar | Utang Tunjangan Uang Makan | Utang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai | Utang Hr. Pelayanan Kesehatan (Non PNS | Jumlah Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2020 | Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PERTANIAN | | | | 322.872.748,00 | | 322.872.748,00 | 322.872.748,00 |
| | **Jumlah** | | | | **322.872.748,00** | | **322.872.748,00** | **322.872.748,00** |

Belanja Pegawai berdasarkan LRA Rp. 12.097.485.680,00 ditambah kekurangan TPP Bulan Desember 2021 Rp. 322.872.748,00 dikurangi TPP Bulan Desember 2020 yang dibayarkan di Bulan Januari 2020 sebesar Rp. 346.603.556,00 Hasilnya merupakan Belanja Pegawai LO yaitu sebesar Rp. 12.073.754.872,00

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **2) Beban Barang dan Jasa-LO** | **13.450.069.937,00** | **12.185.550.745,00** |

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3.41. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan tahun 2020**

*dalam rupiah*

| No | Beban Barang dan Jasa | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Persediaan | 7.576.529.523 | 1.810.545.273 |
| 2 | Beban Jasa | 4.722.863.446 | 6.363.474.521 |
| 3 | Beban Pemeliharaan | 398.896.300 | 235.945.396 |
| 4 | Beban Perjalanan Dinas | 750.880.668 | 515.753.055 |
| 5 | Beban Lainnya | 900.000 | 3.259.832.500 |
| | **Jumlah** | **13.450.069.937** | **12.185.550.745** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(a) Beban Persediaan** | **7.576.529.523,00** | **1,810,545,273,00** |

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2021 sebagai berikut.

**Tabel 3.42. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019**

*dalam rupiah*

| Keterangan | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 1. Belanja Persediaan LRA | 7.538.434.203,00 | 1,797,246,525 |
| Ditambah | | |
| 2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu | 0,00 | 0,00 |
| 3. Mutasi Antar SKPD (BPRD) | 650.000,00 | 0,00 |
| 4. Hibah persediaan dari Pemerintah Provinsi (Bank Jatim) | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 5. Reklasifikasi Belanja Modal BOS menambah persediaan | 0,00 | 0,00 |
| 6. Koreksi persd. Suku cadang | 0,00 | 0,00 |
| 7. Beban persediaan 2020 yang masih harus di bayar | 90.192.702,00 | 95.991.450,00 |
| 8. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5+6+7) | 90.842.702,00 | 103.491.450,00 |
| 9. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+8) | 7.629.276.905,00 | 1.900.737.975,00 |
| Dikurangi | | |
| 10. Utang beban persedian tidak menambah persediaan (RSUD) | 0,00 | 0,00 |
| 11. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember. | (52.747.382,00) | (90.192.702,00) |
| 12. Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| 13. Reklasifikasi beban persediaan ke baban hibah (gazebo) pariwisata | 0,00 | 0,00 |
| 14. Penerimaan hibah PMT Pusk. Gucialit di catat terlalau tinggi | 0,00 | 0,00 |
| 15. Pembayaran utang belanja tahun lalu | 0,00 | 0,00 |
| 16. Hibah persediaan ke luar | 0,00 | 0,00 |
| 17. Jumlah Pengurangan (10+11+12+13+14+15+16) | (52.747.382,00) | (70.096.102,00) |
| 18. Beban Persediaan (9+17) | **7.576.529.523,00** | **1.810.545.273,00** |

**Tabel 3.43. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan Thun 2020**

*dalam rupiah*

| No. | Beban Persediaan | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Bahan Pakai habis | 1.592.572.023,00 | 264.239.480,00 |
| 2 | Beban Bahan / Material | - | 850.696.285,00 |
| 3 | Beban Cetak dan Penggandaan | 116.457.000,00 | 186.542.508,00 |
| 4 | Beban Makanan dan Minuman | 390.575.000,00 | - |

| No. | Beban Persediaan | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|
| 6 | Beban Pakaian Khusus Hari(hari Tertentu | - | 70.137.500,00 |
| 7 | Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 5.476.925.500,00 | 438.929.500,00 |
| 8 | Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | - | - |
| | **Jumlah Beban Persediaan** | **7.576.529.523,00** | **1.810.545.273,00** |

1. Belanja alat tulis kantor di LRA sebesar Rp. 224.006.989,00 ditambah persediaan awal sebesar Rp. 3.781.525,00 dikurangi persediaan akhir sebesar Rp. 3.218.600,00
2. Belanja alat listrik pada belanja LRA sebesar Rp. 8.396.500,00 ditambah persediaan awal Rp. 1.453.000,00 dikurangi persediaan akhir Rp. 857.400,00
3. Belanja bahan lainnya pada belanja LRA sebesar Rp. 158.516.300,00 ditambah persediaan awal Rp. 1.407.000,00 dikurangi persediaan akhir Rp. 613.600,00
4. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan pada belanja LRA sebesar Rp. 0,00 dikurangi persediaan awal Rp. 80.931.435,00 dikurangi persediaan akhir Rp. 33.500.610,00
5. Belanja Obat-obatan pada belanja LRA sebesar Rp. 73.907.900,00 dikurangi persediaan akhir Rp. 12.852.400,00
6. Belanja barang cetak pada belanja LRA sebesar Rp. 114.892.030,00 ditambah persediaan awal Rp. 2.619.742,00 dikurangi persediaan akhir Rp. 1.704.772,00, ditambah mutasi masuk dari BPRD sebesar Rp. 650.000

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(b) Beban Jasa** | **4.722.863.446,00** | **6,363,474,521.00** |

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp. 4.722.863.446,00 dan Rp. 6,363,474,521.00 sebagai berikut :

**Tabel 3.44. Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2020**

*dalam rupiah*

| No | Jenis Beban Jasa | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Jasa Kantor | 4.291.535.932,00 | 1,636,435,307.00 |
| 2 | Beban Premi Asuransi | 210.644.604,00 | 199,501,214.00 |
| 3 | Beban Sewa Ruma h / Gedung / Gudang / Parkir / Tempat | - | 5,300,000.00 |
| 4 | Beban Sewa Sarana Mobilitas | - | 9,450,000.00 |
| 5 | Beban Sewa Alat Berat | - | - |
| 6 | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan | 8.000.000,00 | 23,390,000.00 |
| 7 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 10.000.000,00 | |
| 8 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS | - | 4,000,000.00 |
| 9 | Beban Jasa Konsultansi | 176.899.910,00 | 1,986,000.00 |
| 10 | Beban Upah/Ongkos Tenaga Kerja | - | 3,933,608,000.00 |
| 11 | Beban Makanan dan Minuman | - | 547,790,000.00 |
| 12 | Beban Barang dan Jasa pada BLUD | - | |
| 13 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis | 25.783.000,00 | 4,000,000.00 |
| 14 | Beban Dana Bos | - | |
| | **Jumlah** | **4.722.863.446,00** | **6,363,474,521.00** |

1. Belanja telepon pada LRA Rp. 8.881.352,00 ditambah utang belanja Telepon Des 2021 Rp. 729.459,00 dikurangi utang belanja telepon Des 2020 Rp 734.109,00
2. Belanja air pada LRA Rp. 23.781.700,00,- ditambah Utang Belanja Air Des 2021 Rp. Rp. 1.973.600,00,- dikurangi utang belanja air Des 2020 Rp 1.900.850
3. Belanja listrik pada LRA Rp. 237.682.174,00,- ditambah Utang Belanja Listrik Des 2021 Rp. 22.026.039,00,- dikurangi Utang Belanja Listrik Des 2020 Rp. 19.729.95,00
4. Belanja kawat/faksimili/internet pada LRA Rp. 129.531.314,00,- ditambah rek internet bulan. Des 2020 Rp. 19.686.104,00,- dikurangi rek. Internet bl. Des 2020 Rp. 11,607,000,00

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(c) Beban Pemeliharaan** | **398.896.300,00** | **235,945,396.00** |

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp. **398.896.300,00** dan Rp. **235,945,396.00** adapun sebagai berikut :

**Tabel 3.45. Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2021**

*dalam rupiah*

| No | Beban Pemeliharaan | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 95.698.300,00 | 198,895,396.00 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga | 7.136.000,00 | 16.250.000,00 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Alat-alat Bantu | 6.700.000,00 | 6.700.000 |
| 4 | Beban Alat Pemeliharaan Tanaman/ Penyimpanan | - | - |
| 5 | Beban Pemeliharaan Komputer | 7.685.000,00 | 14.100.000,00 |
| 6 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 281.677.000,00 | - |
| | **Jumlah** | **398.896.300,00** | **235,945,396.00** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(d) Beban Perjalanan Dinas** | **750.880.668,00** | **515.753.055,494** |

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas biasa dan perjalann dinas dalam kota dengan saldo sebagai berikut.

**Tabel 3.46 Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| No | Beban Perjalanan Dinas | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 636.605.000,00 | 272.925.000,00 |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 112.775.668,00 | 242.828.055,00 |
| 3 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 1.500.000,00 | - |
| | **Jumlah Beban Perjalanan Dinas** | **750.880.668,00** | **515.753.055,00** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **(e) Beban Lainnya** | **900.000,00** | **3,259,832,500.00** |

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2021 da 2020 sebesar Rp 900.000,00 dan Rp. 3,259,832,500.00 adapun sabagai berikut :

**Tabel 3.47. Daftar Rincian Beban Lain-lain LRA dan LO Tahun 2021**

*dalam rupiah*

| No | Uraian | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| **BELANJA LAINNYA – LRA** | | | **0,00** |
| **PENAMBAHAN** | | | |
| 1 | Reklasifikasi Belanja Modal ke belanja/beban lainnya (barang ekstrakomtabel) karena tidak menambah aset tetap | 900.000,00 | |
| | **Jumlah** | | 900.000,00 |
| **PENGURANGAN :** | | | |
| 1 | Reklasifikasi belanja/beban lainnya menambah aset tetap | 00,00 | |
| | **Jumlah** | | 00,00 |
| **BEBAN LAINNYA LO** | | | **900.000,00** |

**Tabel 3.48. Daftar Rincian Beban Lainnya tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

| No | Beban Lainnya | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Alat Pengolahan | | - |
| 2 | Beban alat ukur lainnya | | 33.750.000,00 |
| 2 | Beban Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan | | - |
| 3 | Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | | 3,246,077,500,00 |
| 4 | Beban Komponen-Komponen Lainnya | 900.000,00 | |
| | **Jumlah** | **900.000,00** | **3,259,832,500.00** |

Beban Lainnya pada tahun 2021 senilai Rp. 900.000,- yang merupakan belanja modal berupa pembelian gerobak yang tidak menambah aset tetap, hal ini dikarenakan nilai gerobak tersebut dibawah Rp. 500.000,- pembelian gerobak tersebut sebanyak 2 unit @Rp. 450.000,- sehingga terjadi reklas dari Aset tetap (alat angkut) menjadi barang ekstrakompetable

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **3) Beban Hibah** | **4.913.185.418,00** | **3.246.077.500,00** |

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.. Beban hibah dapat berbentuk uang, barang, dan / atau jasa. Rincian realisasi beban hibah tahun 2021 sebagai berikut.

**Tabel 3.49. Daftar Rincian Beban Hibah tahun 2021**

*dalam rupiah*

| No | Beban Hibah | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| . | | | |
| 1 | **Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang BerbadanHukum Indonesia** | | **4.913.185.418,00** |
| | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 3.985.320.050,00 | |
| | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 927.865.368,00 | |
| | **Jumlah** | | **4.913.185.418,00** |
| | **Jumlah Beban Hibah** | | **4.913.185.418,00** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **4) Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **1.350.798.318,04** | **1,574,758,190.16** |

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 Rp **1.350.798.318,04** sebagai berikut.

**Tabel 3.50. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020**

*dalam rupiah*

| No | Beban Penyusutan | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 665.025.391,96 | 906,553,643.64 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 618.969.977,48 | 621,160,697.92 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan | 10.260.348,60 | 10,260,348.60 |
| 4 | Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya | 00,00 | 0,00 |
| | Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap | 00,00 | 1,537,974,690.16 |
| 5 | Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | 56.542.600,00 | 36,783,500.00 |
| | **Jumlah** | **1.350.798.318,04** | **1,574,758,190.16** |

## c. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **1) Defisit Penghapusan Aset Non Lancar** | **57.103.000,00** | **297.497.937,23** |

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2021 sebesar **57.103.000,00** Defisit penghapusan aset non lancar tahun 2020 merupakan defisit penghapusan kendaraan roda dua karena hilang dll, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.51. Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2021**

*dalam rupiah*

| No | SKPD | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Asset lain-lain | - | 295.624.858,00 |
| 2 | Asset tetap peralatan dan mesin | - | 1.873.078,43 |
| 3 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 57.103.000,00 | |
| 4 | | | |
| | **Jumlah** | **57.103.000,00** | **297,497,937.23** |

**Tabel 2. Rincian Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2021**

*dalam rupiah*

| NO | Nama Akun | JUMLAH | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 57.103.000,00 | Menghapus KDP-Kontruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan SK SEKDA Penghapusan KDP Nomor: 188/38/427.12/2021 |
| | | | |
| | **Jumlah (3)** | **57.103.000,00** | |
| | | | |
| | **Jumlah** | **57.103.000,00** | |

**d. Surplus (Defisit) LO**

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **1) Surplus (Defisit) LO** | **(31.322.087.811,71)** | **(26.442.892.902,72)** |

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

**Tabel 3.533. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2021**

*dalam rupiah*

| No | Surplus (defisit) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi | (31.264.984.811,71) | (26.145.394.965,49) |
| 2 | Surplus (Defisit) Non Operasi | (57.103.000,00) | (297.497.937,23) |
| 3 | Pos Luar Biasa | 0.00 | |
| | **Jumlah** | **(31.322.087.811,71)** | **(26.442.892.902,72)** |

## 3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **a. Ekuitas Awal** | **30.358.136.155,91** | **31.965.212.149,63** |

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. **30.358.136.155,91** merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. **31.965.212.149,63** merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2019 *audited.*

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **b. Surplus (Defisit) LO** | **(31.322.087.811,71)** | **(26.442.892.902,72)** |

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel 3.54. Surplus/Defisit LO**
**Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

| No | Uraian | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan LO | 522.823.733,33 | 528.069.066,67 |
| 2 | Beban | 31.787.808.545,04 | 26.680.964.032,16 |
| 3 | Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2) | (31.264.984.811,71) | (26.145.394.965,49) |
| 4 | Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional | 57.103.000,00 | (297.497.937,23) |
| 5 | Pos Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Surplus / Defisit LO (3+4+5) | **(31.322.087.811,71)** | **(26.442.892.902,72)** |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar** | **(182.331.000,00)** | **0,-** |

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya di tahun 2021.

Koreksi kesalahan saldo awal yang berdampak pada penurunan ekuitas awal sebesar Rp. 0,- antara lain:

1) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang (Rp. 0,-);
2) Koreksi Nilai Persediaan (Rp. 0,-);
3) Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Rp. 177.581.000,- koreksi ini dari adanya mutasi keluar Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung Kantor di Ds. Sumber Urip, Kec. Pronojiwo ke Dinas Perkebunan Provinsi Jatim
4) Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rp. 0,-);
5) Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp. 0,-);
6) Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rp. 0,-;
7) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 4.750.000,- koreksi ini karena adanya koreksi akumulasi penyusutan dari KIB E pindah ke KIB B
8) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp. 0,-);

9) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi (Rp. 0,-);
10) Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi (Rp. 0,-);
11) Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi (Rp. 0,-);
12) Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rp. 0,-); dan
13) Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0,-

**1) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang (Rp. 0,-)**

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang (Rp. 0,-)berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.55. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | **Jumlah** | | |

**2) Koreksi Nilai Persediaan (Rp. 0,-)**

Koreksi Nilai Persediaan (Rp. 0,-) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.56. Koreksi Nilai Persediaan**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | **Jumlah** | | |

**3) Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah (Rp. 177.581.000,-)**

Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah (Rp. 177.581.000,-) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.57. Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pertanian | 177.581.000 | Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung Kantor di Ds. Sumber Urip, Kec. Pronojiwo ke Dinas Perkebunan Provinsi Jatim |
| 2 | | | |
| | **Jumlah** | | |

**4) Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rp. 0,-)**

Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Rp. 0,-) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.58. Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | **Jumlah** | | |

**5) Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp. 0,-**

Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp. 0,- berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.59. Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | **Jumlah** | | |

**6) Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rp. 0,-**

Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rp. 0,- berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.60. Koreksi Aset Tetap Jalan dan Irigasi**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | **Jumlah** | | |

**7) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp. 4.750.000,-)**

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp. 4.750.000,-); berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.61. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

*dalam rupiah*

| NO | Golongan Barang | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 4.750.000 | Koreksi akumulasi penyusutan dari KIB E pindah ke KIB B |
| | **Jumlah** | | |

**8) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp. 0,-)**

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp. 0,-) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.62. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

*dalam rupiah*

| NO | Nama Rekening | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | **Jumlah** | | |

9) **Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi Rp. (Rp. 0,-)** Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi Rp. (Rp. 0,-) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 4. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | **Jumlah** | | |

**10) Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi (Rp. 0,-)**

Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi (Rp. 0,-) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 5. Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | Jumlah | | |

**11) Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi (Rp. 0,-)**

Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi (Rp. 0,-) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 3.65. Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | Jumlah | | |

**12) Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rp. 0,-)**

Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rp. 0,-) berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | Jumlah | | |

**13) Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0-,**

Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0-, berdampak pada penurunan nilai ekuitas awal periode, terinci sebagai berikut.

**Tabel 7. Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka**

*dalam rupiah*

| NO | SKPD | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| | Jumlah | | |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|---|---|
| **d. Ekuitas Akhir** | **29.339.569.999,77** | **30.358.136.155,91** |

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

**Tabel 8. Laporan Perubahan Ekuitas**

*dalam rupiah*

| No | Keterangan | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekuitas Awal | 30.358.136.155,91 | 31.965.212.149,63 |
| 2 | Surplus (defisit) LO | (31.322.087.811,71) | (26.442.892.902,72) |
| 3 | Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar | (182.331.000,00) | - |
| 4 | Lain-lain ( RK-PPKD ) | - | - |
| 5 | RK - PPKD | 30.485.852.655,57 | 24.835.816.909,00 |
| **6** | **Ekuitas Akhir** | **29.339.569.999,77** | **30.358.136.155,91** |

# IV. INFORMASI NON KEUANGAN

## a. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

### a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

1) Prasasti Mula Malurung
2) Naskah Negara Kertagama
3) Kitab Pararaton
4) Kidung Harsa Wijaya
5) Kitab Pujangga Manik
6) Serat Babat Tanah Jawi
7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
2) R. Abu Bakar (1941-1948);
3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
4) R. Sukardjono (1959-1966);
5) N.G. Subowo (1966-1973);
6) Suwandi (1973-1983);
7) Karsid (1983-1988);
8) H.M. Samsi Ridwan (1988-1993);
9) Tarmin ariyadi (1993-1998);
10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998-2003);
11) Drs.H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003-2008);
12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2008-2013);
13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2013-2018);
14) Drs. As’at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014-2018)
15) H. Thoriqul Haq, S.Ag, MML - Ir. Hj. Indah Amperawati Masdar, M.Si (2019-2023)

## b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang:
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

## c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 $KM^2$ atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

## d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

## e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah

Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

## f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

## g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

### 1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

# V. P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi *(Intergenerational Equity).*
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
   a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari yang dianggarkan.
   b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
   c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan surplus anggaran.
   d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
   e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
   f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
   g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
   h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
   i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
   j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021terdiri:
      (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
      (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
      (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
      (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan , aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
      (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih,

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.

(6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021.

(7) Serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.

3. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan.